

ANALISIS ASET TIDAK BERWUJUD DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Dini Seprianti¹⁾, Fuji Rahma Lestari²⁾, Gita Fauzia Putri³⁾, Gita Putri Dwi Yuni^{4*)},
Itra Leli⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

email: diniseprianti22@gmail.com¹⁾

fujirahmalestari599@gmail.com²⁾

fauziaputrigita@gmail.com³⁾

gitaputri59241@gmail.com^{4*)}

ittra0322@gmail.com⁵⁾

ABSTRACT

Purpose: This study aims to analyze intangible assets in Tanah Datar District Health Office.

Desain/ methodology/ approach: The method used in research is a qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation.

Findings: The results showed that the analysis of intangible assets did not have software, because the Tanah Datar District Health Office did not have its own intangible assets.

Research Implications: The results of this study have not been able to analyze the software available at the Tanah Datar District Health Office.

Keywords: Intangible Assets; Health Office; Software

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset tidak berwujud di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Desain/Metodologi/Pendekatan Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar belum memiliki aset tidak berwujud sendiri maka belum ada perangkat lunak untuk menganalisis Aset Tidak Berwujud.

Implikasi Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini belum mampu menganalisis perangkat lunak yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Aset Tidak Berwujud; Dinas Kesehatan; Perangkat Lunak

E-Journal Al-Dzahab
Vol. 4, No. 2
September 2023
Hal. 133-142

p-ISSN: 2808-7631
e-ISSN: 2808-758

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, diperlukan tata kelola penataan dana daerah yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu langkah penerapan manajemen bersih adalah pemerintahan kota harus membuat laporan ekonomi provinsi. Dana daerah itu sekurang-kurangnya berbentuk laporan kinerja rencana pengeluaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermutu tinggi dapat dikonsultasikan berdasarkan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (Pujanira & Taman, 2017).

Selain sebagai kerangka konseptual, SAP juga merupakan standar akuntansi. Prinsip akuntansi adalah konsep, peraturan, kebiasaan, prosedur, metode dan teknik yang dipilih dari kerangka konseptual (PABU), standar akuntansi atau praktik terbaik dan digunakan dan

dipilih oleh masyarakat dan didefinisikan lebih lanjut untuk penyusunan laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu. Pemerintahan merupakan lembaga yang memiliki sejarah khusus dalam mengembangkan kebijakan pemerintahannya. Negara bagian perkembangan prinsip-prinsip akuntan publik berjalan paralel dengan perkembangan akuntansi swasta dan terus berkembang. Meskipun perkembangan akuntansi di Amerika Serikat meningkat pesat, perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami Stagnan (Afifah & Sopiany, 2017).

Standar akuntansi negara diterapkan sebagai bagian dari administrasi, baik di administrasi negara dan kementeriannya serta di pemerintahan daerah dan otoritasnya. Penerapan standar akuntansi negara kemungkinan akan berpengaruh pada kenaikan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan negara bagian dan daerah. Artinya, data keuangan pemerintah bisa membuat untuk pengambilan keputusan pemerintah yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas (Hartoyo, 2017).

Kabupaten Tanah Datar adalah Bagian di salah satu wilayah administratif di Sumatera Barat, Indonesia ibu kota Batusangkar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Deswira, 2022), di ambil kesimpulan bahwa kemampuan ekonomi pemerintah kabupaten Tanah Datar di tahun 2016-2020 dapat tergolong sangat rendah berdasarkan derajat kemandirian ekonomi daerahnya. Kinerja keuangan berdasarkan analisis Pemerintah daerah tahun 2016-2020 tentang belanja modal eksekutif dan belanja bisnis, maka dapat dilihat bahwa tidak ada titik dimana persentase belanja bisnis dengan belanja modal masih terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan pemerintah kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah. Berdasarkan rasio efisiensi pendapatan awal daerah Kabupaten Tanah Datar masih cukup efisiensi, dengan setiap tahun masih dapat diketahui tingkat efisiensi pendapatan daerah sebesar 96,50%.

Terkait adopsi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan, dan untuk laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 mewajibkan dewan atau pemerintah kota Membuat laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan komentar terhadap laporan keuangan. Catatan Menurut akuntansi berbasis akrual, yang digunakan dalam laporan keuangan, transaksi dan peristiwa dipengaruhi ketika terjadi, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual diperlukan dalam mencatat pendapatan, beban di laporan laba rugi, serta pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca, bersama dengan pengungkapan perubahan ekuitas. Sementara basis kas laporan realisasi anggaran diperlukan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran, yaitu atau dihitung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah menggunakan prinsip akuntansi yang dikenal dengan SAP. SAP diperlukan sehubungan dengan penyusunan laporan pelaksanaan APBN/APBD untuk Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan semuanya termasuk dalam laporan keuangan. Catatan keuangan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Perkembangan akuntansi pemerintahan tidak secepat akuntansi bisnis, karena karakteristiknya yang sedikit berubah.

Dibawah kepemimpinan masyarakat SAP sangat penting. Kuantitas uang yang dikelola pemerintah terus bertambah, seperti halnya kebutuhan akan tanggung jawab keuangan sebagai bentuk keterbukaan keuangan di pemerintahan. Peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan menyeluruh dari manajemen negara sektor publik. Untuk memperjelas hal ini, masyarakat menciptakan standar dasar yang harus dipatuhi pemerintah baik undang-undang maupun undang-undang dan peraturan lainnya. Akibatnya, ada perbedaan dalam bagaimana

akuntansi pemerintah dan akuntansi perusahaan diperlakukan sehubungan dengan penetapan tujuan dan keberhasilan. walaupun tujuan organisasi berbeda, namun tujuan SAP dan akuntansi perusahaan yaitu dasarnya sama, dengan memberikan pelaporan keuangan mengenai transaksi keuangan yang dikelola oleh organisasi pada jangka waktu tertentu.

Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan bisnis berdasarkan pengukuran kinerja, membuat ketiga aspek tersebut memiliki tujuan yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas. Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas daripada kedisiplinan pada peraturan UU yang berlaku. Namun ini menjadi masalah bagi pengguna Sumber daya yang digunakan dengan murah, efektif, dan bijaksana efektif.
2. Manajerial. Akuntansi pemerintah memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi manajerial dalam merencanakan dan metode penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sektor pembangunan.
3. Pengawasan. Akuntansi pemerintah untuk memantau proses keuangan negara sehingga dapat diperiksa dengan mudah oleh lembaga keuangan seperti PBK (Satrio, Yuhertiana, & Hamzah, 2016).

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Fungsi akuntansi pemerintahan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Tidak ada laporan laba akuntansi pemerintah
2. Pesan anggaran saat dipesan
3. Lebih dari satu jenis dana dapat digunakan dalam akuntan pemerintahan

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

1. Perbuatan atau perhitungan (*accountability and stewardship*). Tujuan dari perbuatan tersebut menyusun informasi keuangan dengan lengkap, cermat, dan tepat, untuk diperlukan oleh pihak yang terkait dengan kegiatan dalam suatu pemerintahan. tujuan pertanggungjawaban ini di haruskan bagi orang atau lembaga yang memerlukan dalam memantau keuangan negara dan menyediakan perhitungan.
2. Manajerial. Manajerial merupakan tugas dari akuntansi pemerintahan yang mengharuskan tersedianya laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
3. Pengawasan merupakan SAP yang harus terlaksananya Pemeriksaan yang efektif dan efisien oleh aparat pengawas yang bekerja (Tandayu, 2019).

Standar akuntansi pemerintah (SAP) yang dulunya berbasis kas kini diubah menjadi standar berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan serta pengeluaran serta pembiayaan berbasis kas. Selain itu, pengakuan aset, utang dan dana ekuitas yang menggunakan basis akrual, menjadi standar akuntansi pemerintah.

Aset Tidak Berwujud

Berdasarkan Menurut PSAK 19 (2018), aset tidak berwujud adalah aset non-finansial, atau non-fisik, yang bukan bersifat finansial. diperoleh kas berupa piutang kas, yang jumlahnya dapat ditentukan. PSAK 19 (2018) mendefinisikan bahwa entitas juga menggunakan sumber daya dalam meningkatkan aset tidak berwujud seperti sains dan teknologi, penciptaan dan penggunaan sistem atau prosedur inovatif, lisensi, hak kekayaan intelektual, intelijen pasar, dan merek dagang (Mustapa, et al., 2022).

Berdasarkan PSAK 19 standar fungsi ekonomi mendatang, manfaat masa depan Penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, dan keuntungan lain yang dihasilkan dari penggunaan aset tidak berwujud entitas adalah contoh aset tidak berwujud. klasifikasi aset tidak berwujud termasuk prasarana, goodwill, waralaba, paten, hak cipta, dan merek dagang. Aset tidak berwujud lainnya, aset lancar tidak berwujud, dan aset tetap tidak berwujud adalah contoh aset tidak berwujud. Paten, hak cipta, hak pakai, niat baik, dan aset tidak berwujud lainnya adalah contohnya. Piutang, sewa Prabayar, asuransi Prabayar, dan aset tidak berwujud

lancar lainnya adalah contohnya. Barang tak berwujud tambahan termasuk biaya pendirian perusahaan (*deferred expenses*) (Firmansyah, Sari, & Maharani, 2020).

Aset tidak berwujud mempunyai fungsi untuk menentukan suatu Tujuan dan taktik Penerapan pengetahuan yang menghasilkan pengembangan sebagai dasar dalam meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan dapat dianggap sebagai perwujudan dari salah satu tugas utamanya. Karyawan yang diberi tanggung jawab akan bekerja lebih efektif dan kompeten berkat keahlian ini. Keuntungan yang dialami perusahaan dari meningkatnya inovasi dan kompetensi karyawan berupa meningkatnya keunggulan kompetitif. Akibatnya, nilai pasar perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai aset tidak berwujud. Untuk menawarkan informasi, aset tidak berwujud harus dilaporkan dalam neraca.

Aset tidak berwujud merupakan hak berharga, dan keuntungan kompetitif berasal dari kepemilikan aset yang jangka panjang, tanpa bentuk fisik tertentu. Kontrak, lisensi, atau catatan hukum lainnya dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset tidak berwujud. Aset yang tidak bersujud berasal dari sumber-sumber berikut:

1. Pemerintah, termasuk paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, dan nama dagang;
2. Bisnis lain, seperti pembelian termasuk pembayaran goodwill; dan
3. Berbagai perjanjian, seperti perjanjian waralaba, waralaba dan sewa.

Menurut standar akuntansi keuangan Indonesia saat ini, berupa pernyataan standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi keuangan-entitas tanpa akuntabilitas publik menyatakan banyak perlakuan untuk mendapatkan aset tidak berwujud. terutama, aset tidak berwujud didapat dalam entitas bisnis. Aset muncul dari kegiatan ini pada saat perusahaan membeli perusahaan lain. Dapat disimpulkan, aset tidak berwujud hanya dapat dinilai melalui perjanjian hukum yang relevan, serta aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Kedua, membeli dengan hibah dari pemerintah. Dalam beberapa keadaan, aset tidak berwujud dapat diperoleh secara gratis atau dengan subsidi publik minimal mahal. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemerintah mentransfer aset tidak berwujud kepada masyarakat umum, seperti hak untuk mengimpor, hak untuk kouta, atau hak untuk menggunakan sumber daya terbatas lainnya atau untuk mendarat di bandara. Yang ketiga adalah pertukaran properti. Pertukaran antara aset berwujud dan tidak berwujud layak dilakukan.

Dengan memeriksa dan memperhitungkan sejauh mana aset tidak berwujud menciptakan arus kas yang berlawanan, seseorang dapat menentukan nilai aset tidak berwujud tersebut. Keempat, produksi internal menghasilkan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang dibuat secara internal ini didasarkan pada gagasan bahwa bisnis mampu melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan aset tidak berwujud secara mandiri. Saat membuat aset tidak berwujud ini, penting untuk mengenali dan mencatat kapan suatu pengeluaran dibiayai dan kapan dikapitalisasi. Aset tidak berwujud adalah aset yang diciptakan bisnis secara internal.

Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh pemerintah dibedakan melalui berbagai sifat sumber daya, metode perolehan, dan jangka waktu ekonomis.

Dilihat dari Dalam hal jenis sumber daya, Aset Non-Wujud meliputi:

1. Software komputer yang disimpan pada disk, kaset, floppy disk, compact disk, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak untuk komputer yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud.
2. waralaba;
3. paten dan hak cipta;
4. Temuan penelitian jangka panjang yang bermanfaat;
5. Aset Tidak Berwujud dengan makna sejarah atau budaya;
6. Aset Tidak Berwujud yang sedang berlangsung.

Aset tidak berwujud dapat berasal dari:

1. Pembelian;
2. Kemajuan Internal;
3. Penebusan, tergantung pada mode akuisisi.
4. Kerja sama, hadiah dan hibah, dan warisan budaya (warisan takbenda) melengkapi daftar.

Aset tidak berwujud diakui pada saat perolehan, jika:

1. Individu atau perusahaan bisa mendapatkan keuntungan finansial dari aset ini dimasa depan.
2. Biaya akuisisi dapat diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud dicantumkan menurut nilai bersih setelah dikurangi amortisasi yang masih harus dibayar di kolom aset neraca untuk aset tidak berwujud. Oleh karena itu, mencatat, mengakui, mengukur, dan melaporkan aset tidak berwujud atau tidak terlihat yang menghasilkan manfaat dapat dikatakan sebagai proses akuntansi aset tidak berwujud.

Ketika mempertimbangkan bagaimana akuisisi atas kepemilikan aset tidak berwujud sesuai dengan kriteria pengakuan, akuisisi aset tidak berwujud dibagi menjadi dua langkah, yaitu:

1. Bagian eksplorasi atau Penelitian
Pada bagian ini pemerintahan tidak bisa membuktikan bahwa aset tidak berwujud tersebut sudah ada dan akan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Misalnya, penelitian Kegiatan yang mencoba untuk mendapatkan informasi baru, mencarinya, menilainya, dan membuat penilaian tentang bagaimana menggunakan temuan dikenal sebagai kegiatan penelitian penelitian atau informasi lain.
2. Tahap Pengembangan
Pengembangan Aset tidak berwujud harus diakui ketika pemerintah dapat menunjukkan bahwa semua kondisi berikut ini benar: secara teknis dimungkinkan untuk membuat aset tidak berwujud dapat digunakan, tujuan dalam memperoleh aset tidak berwujud, manfaat finansial dan sosial di masa depan, dan tersedianya manfaat teknis ,finansial dan keuntungan lainnya yang memadai sumber daya dalam menyiapkan perkembangan dan eksfloitasi aset tidak berwujud dan usaha untuk mengukur biaya kepemilikan secara wajar (Simamora, 2012).

Perangkat lunak (*software*) atau dikelola pada instansi pemerintahan belum diakui dalam aset tidak berwujud disebabkan:

1. Sulitnya menentukan bagaimana perlakuan pengembangan kekayaan jauh aktivitas instansi pemerintah,
2. Kendala dalam menentukan bagaimana serta Ketika suatu aset akan menguntungkan masyarakat dan ekonomi di masa depan,
3. Sulit untuk membenarkan biaya akuisisi.
4. jenis inisering kali terbuka, tidak memiliki perlindungan hukum dapat digunakan oleh umum, oleh karena itu, merupakan bagian dari bentuk pengakuan aset tidak berwujud adalah tidak adanya pengendalian atas aset tersebut.

Tujuan memperoleh aset tidak berwujud adalah untuk mendukung operasi pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan aset tidak berwujud harus dihentikan. Salah satu penjualan, pertukaran, hibah, atau transaksi lain yang mengakhiri kehidupan ekonomi aset tidak berwujud dan mengharuskan pembelian yang baru adalah apa yang menyebabkannya kedaluwarsa. Dengan demikian, aset tidak berwujud dihapuskan yang akan

dipisahkan ketika Aset Tidak Berwujud tidak memiliki keuntungan keuangan jangka panjang yang diharuskan dar pelepasannya.

Dalam konteks pemerintah, pelepasan aset tidak berwujud sering disebut sebagai transfer. Pemerintah dapat mengalihkan BMN/BMD yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. Dijual
2. diperdagangkan;
3. diberikan; atau
4. digunakan sebagai pelibatan modal negara/daerah.

Aset tidak berwujud kecuali untuk aset tidak berwujud, yang memiliki masa manfaat tanpa akhir, diamortisasi. Amortisasi adalah alokasi penyusutan aset tidak berwujud yang sistematis dan wajar selama masa manfaatnya. Penyusutan dapat dihitung dengan beberapa cara, termasuk metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi, dan metode penyusutan yang tercakup dalam bagian aset tetap. Mekanisme penyusutan yang digunakan harus konsisten dengan manfaat ekonomi yang diprediksi dari pola konsumsi unit. Pendekatan garis lurus digunakan jika pola tidak dapat diidentifikasi secara akurat. Pada akhir setiap periode, penyusutan terjadi.

Software atau perangkat lunak pihak ketiga didapatkan dengan pembelian, hibah, atau pertukaran. Akuisisi dengan Pembelian dapat dilakukan secara langsung atau melalui perjanjian dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara. Pada saat akuisisi, aset tidak berwujud dinilai dengan biaya akuisisi. Ukur aset alih-alih aset tidak berwujud jika pengukuran biaya akuisisi tidak memungkinkan. Aset tidak berwujud terkait pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Ketika membeli aset tidak berwujud dalam jumlah besar, perlu untuk menentukan nilai masing-masing aset dan mengalokasikan biaya keseluruhan berdasarkan nilai wajar. setiap asset. Harga beli Aset Tidak Berwujud dibagi menjadi:

1. Harga pembelian, lebih sedikit diskon dan rabat, lebih sedikit biaya impor dan pajak;
2. Semua biaya yang terkait langsung dengan mengembalikan barang ke keadaan yang diinginkan. Salah satu biaya yang dialokasikan langsung adalah: Biaya langsung untuk pelatihan karyawandalam penggunaan aset, Biaya pengujian untuk memastikan berfungsnya aseti dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek alami (seperti eksperimen resisten). Teknik pengumpulan data digabungkan menjadi segitiga triangulasi, analisis data kualitatif dan induktif, dan temuan penelitian kualitatif menempatkan penekanan kuat pada generalisasi.

Keadaan saat ini dari kumpulan individu, benda, ruang, sistem mental, atau kelas kejadian semuanya dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan penggambaran yang metodis, obyektif, dan tepat tentang detail, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dari sini, dapat dilihat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah teknik yang menggunakan cara alami untuk menjelaskan peristiwa dengan menggunakan kalimat dan bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan merupakan kantor pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab utama mengelola urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tetap berpegang pada prinsip otonomi dan tanggung jawab bantuan daerah. Selain itu, Dinas Kesehatan bertugas membantu Bupati mengelola urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tanggung jawab bantuan kabupaten. Layanan offline disediakan untuk komunitas, dan hotline tersedia bagi siapa saja yang tidak dapat mengunjungi secara langsung. Puskesmas setelah dihubungi akan ada petugas verifikasi, dengan menggunakan kendaraan operasional, petugas akan mengunjungi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena meningkatnya penggunaan teknologi yang berkembang saat ini. Begitu juga dengan dinas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan, masyarakat tidak perlu mengantri langsung ke kantor pelayanan namun masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui aplikasinya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di Dinkes Kabupaten Tanah Datar, dimana ibu caca selaku bendahara, dapat dijelaskan perlakuan akuntansi terhadap Aset Tidak Berwujud berbentuk software yang dimiliki Dinkes Kabupaten Tanah Datar.

Terkait dengan jumlah software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui berdasarkan wawancara dengan ibu caca.

“jumlah software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar yaitu 1 buah software”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar yaitu memiliki 1 jenis software yang digunakan dalam pelayanan masyarakat secara online.

Terkait dengan nama software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui melalui wawancara dengan ibu caca.

“Nama Software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar yaitu Aplikasi Si Tampan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar bahwa nama software yang dimiliki pada Dinas tersebut bernama aplikasi Si Tampan.

Adapun media penyimpanan terkait dengan software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui berdasarkan wawancara dengan ibu caca:

“Aplikasi Si Tampan ini disimpan dalam media penyimpanan secara online”.

Berdasarkan hasil wawancara yaitu dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar bahwa software yang dimiliki pada Dinas tersebut di simpan dalam media penyimpanan online.

Terkait dengan cara perolehan software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Caca:

“Cara perolehan aplikasi Si Tampan yaitu dengan dikembangkan sendiri tidak dikontrak, aplikasi tersebut diberikan kepada masing-masing bidang yang ada di Dinkes Kabupaten Tanah Datar dan Admin dari Aplikasi Si Tampan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software pada Dinas tersebut tidak dibeli namun dikembangkan dan dikelola oleh pihak pengembang

Terkait dengan harga perolehan atau nilai kontrak dari software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Caca:

“Untuk nilai kontrak Aplikasi Si Tampan ini tidak memiliki nilai kontrak, karena diperoleh dengan cara gratis dari kementerian”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa Aplikasi Si Tampan tidak memiliki nilai kontrak.

Terkait dengan kegunaan software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Kegunaan dari Aplikasi Si Tampan itu untuk memudahkan Pegawai melihat dan mengelola datanya terkait LKH, TPP, Tugas Tambahan, Kreativitas, Penilaian Prestasi Kerja, SKP (tahunan dan bulanan), dan menu Persetujuan (selain Non Eselon)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa kegunaan dari software ini untuk membantu para Pegawai dalam melihat dan mengelola datanya terkait Tugas Tambahan, Kreativitas, Penilaian Prestasi Kerja, LKH, TPP, dan Menu Persetujuan (selain Non Eselon), serta SKP (tahunan dan bulanan)

Terkait dengan software yang dimiliki secara penuh atau dibawah pengendalian pengembang software pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan ini masih dibawah pengendalin pengembang aplikasi tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) tidak dimiliki penuh, namun masih dibawah pengendalian pengembang software itu sendiri.

Terkait dengan cara perolehan software pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan ini diperoleh secara eksternal”

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, bahwa cara perolehan software tersebut diperoleh secara eksternal, karena software tersebut di miliki secara gratis dari pihak Kementerian Republik Indonesia.

Terkait dengan software yang merupakan bagian integral (terikat dengan hardware) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan ini terikat dengan hardware, karena kalau tidak ada hardware maka Aplikasi Si Tampan ini tidak akan terbuka ataupun dapat dilihat”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) harus terkait dengan hardware. Karena hardware adalah perangkat keras seperti komputer, handphone dan lain-lainnya. Sedangkan Software adalah perangkat lunak seperti aplikasi. Jadi kalau salah satu tidak ada maka tidak akan berfungsi, dimana untuk mengakses suatu aplikasi maka harus ada handphone ataupun yang lainnya, begitu juga dengan sebaliknya jika hanya ada handphone atau yang lainnya namun tidak ada aplikasi bagaimana bisa mengakses apa yang di perlukan.

Terkait dengan perolehan software Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang untuk dijual Kembali atau diserahkan kepada masyarakat dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan tidak untuk dijual Kembali, tetapi diserahkan kepada Pegawai secara gratis, sehingga Pegawai dapat melihatnya menggunakan paket data atau internet saja”

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software yang sudah diperoleh secara Gratis tersebut tidak untuk dijual, namun di serahkan kepada pegawai supaya Pegawai dapat mengakses atau melihat informasi yang dibutuhkan atau ada perubahan terkait informasi pegawai , dimana pegawai tidak perlu membayar atas aplikasi tersebut dan pegawai tidak perlu membuat data Secra manual ataupun mencari informasi terkait perubahan data pegawai , pegawai dapat mengaksesnya melalui internet saja.

Terkait dengan perolehan software Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai apa pada laporan keuangan dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan tidak dijual kembali, diberikan kepada pegawai supaya pegawai dapat mengakses aplikasi mengenai informasi laporan kerja pegawai. Aplikasi Si Tampan tidak diakui dalam laporan keuangan sebagai Aset Tidak Berwujud”

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) tidak diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Laporan Keuangan Dinkes Kabupaten Tanah Datar, namun Aplikasi Si Tampan tidak untuk dijual kembali, tetapi diperuntukkan sebagai aplikasi untuk Keperluan Pegawai.

Terkait dengan software Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang digunakan lebih dari 1 tahun dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan digunakan lebih dari 1 tahun”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) sudah digunakan lebih dari 1 tahun.

Terkait dengan software Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang diamortisasi dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan tidak diamortisasi, kalau bisa Aplikasi Si Tampan berkembang tiap tahun ”

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) tidak diamortisasi, karena masa penggunaan software tidak terbatas.

Terkait dengan software Dinkes yang diamortisasi menggunakan metode apa dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Caca:

“Aplikasi Si Tampan tidak di amortisasi, jadi tidak dilakukan amortisasi dengan metode”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) tidak menggunakan metoda amortisasi, karena software tersebut tidak di amortisasi.

Terkait dengan software Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang telah dihentikan penggunaannya dapat diketahui melalui wawancara dengan Ibu Caca:

“Sejak Aplikasi ini diberikan Secara Gratis sampai saat ini, tidak pernah software (Aplikasi Si Tampan) yang dihentikan penggunaannya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa software (Aplikasi Si Tampan) tidak pernah dilakukan penghentian penggunaan software tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Dinkes Kabupaten Tanah Datar, bahwa Dinkes Kabupaten Tanah Datar memiliki 1 software yang digunakan yaitu

Aplikasi Si Tampan. Aplikasi Si Tampan hanya bisa digunakan oleh Pegawai Dinkes Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari dan Mengakses data informasi pegawai .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, diambil kesimpulan yaitu Aset Tidak Berwujud dimiliki yang berupa software oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar . Software yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Tanah Datar, yaitu Aplikasi Si Tampan yang cara perolehan software tersebut dengan cara gratis dan dikembangkan. Aplikasi Si Tampan ini tidak memiliki nilai perolehan karena diperoleh secara gratis , dan tidak dicatat dalam laporan keuangan karena tidak memiliki nilai perolehan. Aplikasi Si Tampan ini hanya bisa digunakan oleh Pegawai Dinkes Kabupaten Tanah Datar, software ini memiliki kegunaan untuk memudahkan para pegawai dalam mengakses informasi dan Data pegawai yang berfungsi untuk memudahkan Pegawai melihat dan mengelola datanya terkait Tugas Tambahan, Kreativitas, Penilaian Prestasi Kerja, LKH, TPP, dan Menu Persetujuan (selain Non Eselon) termasuk dalam kategori SKP (tahun dan bulanan).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I., & Sopiany, H. (2017). Akuntansi Pemerintahan Daerah. 87.
- Deswira. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah: Study Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 74–90. doi:<https://doi.org/10.30630/jam.v17i1.181>
- Firmansyah, A., Sari, K., & Maharani, P. (2020). IMPLEMENTASI ASET TAK BERWUJUD PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 52–61. doi:<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/68>
- Hartoyo. (2017). ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN BIMA. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Mustapa, D., Widianingrum, Astika, A., Raihana, A., Deaprila, Z., & Murti, T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 8(1), 2331–2338.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Satrio, Yuhertiana, & Hamzah. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), . <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>, 59–69.
- Simamora, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).
- Tandayu, V. O. (2019). Analysis of the Implementation of Regional Government Accounting Systems. *Jurnal EMBA*, 7(5), 3169–3178.